



## Research Article

# Problem Kepakaran dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Analis Kapasitas Keilmuwan Dalam Tradisi Islam

Muhammad Maulidin Baharsyah<sup>1</sup>, Aldy Pradhana<sup>2</sup>

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia  
E-mail: [maulidin@unida.gontor.ac.id](mailto:maulidin@unida.gontor.ac.id)



2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia  
E-mail: [aldy\\_pradhana@unida.gontor.ac.id](mailto:aldy_pradhana@unida.gontor.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 23, 2024

Revised : October 27, 2024

Accepted : March 12, 2025

Available online : July 28, 2025

**How to Cite:** Muhammad Maulidin Baharsyah and Aldy Pradhana (2025) "Problems of Expertise and Its Impact on Society: Analyst of Scientific Capacity in Islamic Tradition", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 773-790. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1578.

## Problems of Expertise and Its Impact on Society: Analyst of Scientific Capacity in Islamic Tradition

**Abstract.** This article aims to elaborate on the concept of experts and their needs today. This research emphasizes comparative analytical study methods by analyzing problems that exist in the Western world and even among Muslims themselves. The confusion in viewing expert figures as authorities have often given rise to various very complex problems. This stems from the failure to recognize expert

figures. The truth is becoming increasingly opaque due to the emergence of various people claiming to be experts, followed by the proliferation of information. It is hoped that the birth of a healthy science culture will be able to overcome such problems. So that complete recognition of experts can occur. Thus, this research aims to restore the expert's position as an authoritative expert, of course, following his capacity and abilities.

**Keywords:** expertise; authority; truth.

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk membahas konsep pakar serta kebutuhannya di masa kini. Di mana penelitian ini menekankan metode studi analisis komparatif dengan menganalisis problem yang hadir di dunia Barat bahkan dalam kalangan muslim sendiri. Adanya kerancuan dalam memandang sosok ahli sebagai otoritas kerap kali telah melahirkan beragam masalah amat kompleks. Hal ini berakar dari gagalnya mengenali sosok pakar. Kebenaran pun makin kian buram lantaran munculnya beragam diri mendakwai sebagai seorang ahli, pun disusul dengan maraknya informasi. Adapun lahirnya budaya ilmu yang sehat diharapkan mampu menanggulangi problem demikian. Sehingga pengenalan terhadap pakar seutuhnya dapat terjadi. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembalikan kembali kedudukan pakar sebagai seorang ahli yang otoritatif tentunya sesuai dengan kapasitasnya atas kemampuannya.

**Keywords:** kepakaran; otoritas; kebenaran.

## PENDAHULUAN

Problem atas keterkaitan pengetahuan dan kebenaran merupakan suatu ancaman kini masih kerap terjadi. (Floridi, 1993, p. 205; Klein, 1983, p. 143) Fenomena ini berpangkal dari kegagalan individu ataupun masyarakat dalam mengenali seorang ahli sebagai otoritas. (Nichols, 2017, p. 11) Dalam kalangan muslim pun merasakan polemik serupa. (Arif, 2018, p. 35; Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, p. 16) Mencuatnya ragam individu mendakwai dirinya sebagai orang “paling mengerti” dan “paling paham” akan suatu permasalahan memicu polemik tersebut. Dorongan ini bermula dari munculnya keinginan untuk “diakui” sebagai mautujud atas realisasi jati dirinya. (Fransisco Budi Hardiman, 2003, p. 85) Mereka menganggap hirarki otoritas tak lagi dibenarkan. (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1993, p. 125) Perbincangan tanpa wasit menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakan begitu saja pada kehidupan sosial. (Sullivan, 2017, p. 225) Akhirnya, realitas palsu dan semu telah menggantikan kebenaran sesungguhnya.

Kebohongan telah menjadi komoditi utama. Masyarakat saat ini lebih menyukai kepalsuan yang berulang-ulang menjadi kebenaran ketimbang kebenaran itu sendiri. (Yasraf Amir Piliang, 2020, p. 30) Model ini lebih digandrungi daripada pengejaran atas makna sejatinya. (Yasraf Amir Piliang, 2020, p. 26) Titik inilah menjadikan diri mereka tidak lagi memerlukan sosok ahli sebagai pakar. Implikasinya, timbul anggapan bahwa gagasan setiap orang dapat diterima kebenarannya. Kebenaran bukan lagi menjadi hal mutlak tetapi dapat diperjual belikan. (Tom Nichols menyebutkan menyeruaknya kesalahan informasi lebih diminati ketimbang pengetahuan sebenarnya. Nichols, 2017, p. 14) Persepsi adanya *gap* antara pakar dan awam sudah tidak relevan saat ini. (Stewart, 2020) Justru

permasalahan ini adalah kemampuan masyarakat dalam menilai pakar sesungguhnya.

Kegagalan masyarakat mengenali pakar telah menyebabkan kerancuan tatanan sosial. Ketidaktahuan mereka telah menjerumuskan dirinya kepada jurang ketidak-beradilan. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2011, p. 145) Belum lagi munculnya para intelektual populis yang cenderung mengejar popularitas dengan mencederai idealisme sesungguhnya. (Syamsuddin Arif, 2017, p. 9) Wajar jika masyarakat kini tak menganggap pakar sebagai faktor penting pada kehidupan. Meski, perlu disadari peranan ahli sebetulnya menjernihkan kegaduhan, walaupun menambah ramai kericuan kerap terjadi. Akibat monopoli kepentingan yang diri mereka lakukan. (H. M. Collins & Evans, 2007, p. 8) Maka, perlunya pengenalan yang benar seperti hadirnya budaya ilmu yang sehat serta pengenalan atas sosok ahli yang benar patut dipertengahkan.

Singkatnya, artikel ini akan mengulas pemetaan atas kedudukan pakar sebagai otoritas. Upayanya dalam mengenali pakar sejati agar mampu terhindar dari kerancuan. Serta, kehadirannya diharapkan mampu menjernihkan polemik acap terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Antara Konsep Pakar Di Barat dan Islam**

Secara istilah, bermacam terma merujuk pakar di Barat telah dikenakan. Ditinjau dari segi historisnya, Plato menyebutkannya *techne* (τέχνη) (Anthony Preus, 2015, p. 380; Tom Angier, 2021, p. 65), bermakna *knowledge* walau pemaknaan demikian menurut Goldman dirasa belum tepat. Pemaknaan lebih tepat baginya adalah *expertise*. (A. I. Goldman, 2001, p. 86) Begitupun istilah lain kerap disandingkan, yakni *expertus* berasal dari Latin selanjutnya terderivasikan ke Inggris menjadi *expert*. (Grundmann, 2017, p. 27; Jamie Carlin Watson, 2022, p. 32) Tiga istilah kunci inilah sering dirujuk sebagai pakar (ahli). Meski, tidak dinafikan wujudnya padanan kata lain yang juga menjelaskan pakar. Seperti, perkembangannya setiap bidang memiliki penyebutan berbeda-beda atas kemahiran seorang ahli. (Grundmann, 2017, p. 41; Jamie Carlin Watson, 2022, p. 88) Jadi, adanya kata ini bukan menafikan istilah lain, justru bukti ini telah menandakan adanya perkembangan atas diskursus ini.

Adapun, dilihat segi terminologisnya makna pakar amat beragam. Bagi Watson, pakar merupakan sosok ahli dengan tingkat kompetensi tinggi dalam suatu domain. (Jamie Carlin Watson, 2022, p. ix) Grundmann menerangkan pakar memiliki sinonimitas sebagai spesialis sebagaimana kini diartikan. Menurutnya, pakar atau kepakaran (keahlian) selalu berkutat dengan kemampuan dan pengetahuan khusus dimiliki oleh seseorang. (Grundmann, 2017, p. 2) Sedangkan, merujuk gagasan Tom Nichols, individu disebut pakar adalah seorang yang memiliki pengetahuan “komprehensif” dan “otoritatif”. Pun dimaknai pula seorang perintahnya dalam bidang tertentu merupakan informasi seluruhnya yang dianggap benar dan dipercaya. Maka menurutnya, pakar yakni orang-orang yang jauh lebih mengerti atas satu pokok pembahasan dibandingkan dengan lainnya. (Nichols, 2017, pp. 29–30)

Meski, bermacam ide telah bermunculan tentu terdapat perbedaan mencolok antara gagasan tersebut utamanya terkait pakar merangkap sebagai otoritas.

Di Barat, kajian atas pakar tak dapat dilepaskan dari tradisi Yunani. Ini teramu dalam kata *techne* yang amat mendominasi penggunaannya pada masanya. Baik Plato maupun Aristotle sepakat terdapat perbedaan atas *techne* dari “*general education*”. Makna ini bukan mendangkalkan seseorang memiliki pengalaman dalam belajar dapat dipukul rata sebagai pakar. Justru dalam *Protagoras*, Plato menuliskan pandangan Socrates bahwa *techne* juga menekankan prasyarat bukan hanya sekedar mengetahui tetapi harus mengerti bidang yang di kuasai. (Jamie Carlin Watson, 2022, p. 52) Richard Parry dalam keterangannya menyatakan seorang yang notabnya pakar tentu memiliki kemampuan dalam memberikan “*universal judgment*”. Hadirnya seorang dengan *techne* ini diharapkan mampu mendapatkan pemahaman lebih jauh tentunya tidak dibatasi dengan pengalaman belaka. (Parry, 2020) Mereka bukan hanya mengerti sebab terjadinya suatu, melainkan adanya pemahaman yang utuh.

Watson pun juga menambahkan tiga aspek lainnya tercakup dalam *techne*. Pertama, *techne* selalu diidentifikasi melewati hasil sehingga kemampuan ahli diukur berlandaskan output yang ia torehkan. (H. Collins, 2018, p. 67; Jamie Carlin Watson, 2022, pp. 54–55) Kedua, *techne* selalu merujuk pada tingkatan. (Aristotle, 1987, Lines 639a3-7; Jamie Carlin Watson, 2022, p. 57) Di mana dalam model ini tergambar setidaknya terdapat dua tingkatan terkandung di dalamnya. Dua level ini merujuk pada pakar (ahli) umum, dan pakar (ahli) khusus. Gagasan atas ahli umum (generalized expert), ditilik lebih lanjut dalam *Protagoras* karya Plato. Ahli umum lebih merujuk pada keyakinan atas domain tertentu hasil atas pelatihan umum (terstruktur maupun tidak) melalui informasi spesifik serta praktik tertentu. Kebalikannya, ahli khusus menandakan kemampuan atas pemahaman terhadap domain tertentu yang muncul dari pelatihan ekstensif serta tersruktur berlandaskan informasi atau praktik spesifik. (Jamie Carlin Watson, 2022, p. 58; Plato, 1952, p. 103) Ketiga, *techne* memerlukan pelatihan yang ekstentif. (Jamie Carlin Watson, 2022, p. 53) Kategorisasi aspek inilah tertanam pada konsep pakar masa Yunani. Bahkan, unsur-unsur ini masih tetap diterapkan hingga periode berikutnya. Walaupun, terdapat ragam perubahan serta perkembangannya.

Memasuki Abad Pertengahan dan Modern terdapat perbedaan mencolok mengenai pakar. Pada era ini perbincangan atas pakar hampir tidak dianggap menjadi suatu yang penting dan relevan. (Immanuel Kant, 1784; Jamie Carlin Watson, 2022, p. 3, 2022, p. 73) Di awal Abad Pertengahan pakar dahulu disebut sebagai *master*, merupakan seorang sarjana atau ahli dalam bidang agama Kristen. Sejujurnya, wujud tujuan pendidikan di masa itu tidak berorientasikan pada pembetulan individu sebagai pakar. (Beckwith, 2012, pp. 43–45) Malah, individu masa ini cenderung mengkritisi gagasan atas pakar yang lahir dari rahim Yunani. Seperti, penolakannya atas diskriminasi potensi bahwa pakar juga memerlukan ini. Bagi manusia modern, hal itu tidak dapat dibenarkan. Mengingat, manusia sebagai individu pada dasarnya telah dilengkapi kemampuan yang sama. (Alister E. McGrath, 2007, p. 34; Jamie Carlin Watson, 2022, p. 70) Poin tersebut disinyalir menyokong penolakan model lama. Model inilah yang menjadikan pembeda antara konsep pakar di zaman Yunani dan modern.

Pun Nichols menambahkan. Dia memberikan beberapa karakteristik yang perlu ada dalam pakar. *True expertise*, yaitu jenis pengetahuan yang diandalkan orang lain, tidak terukur. Itu adalah perpaduan pendidikan, bakat, pengalaman, dan pengakuan rekan sejawat. (Nichols, 2017, p. 30) Empat karakter inilah menurut gagasannya perlu tertanam dalam diri sosok pakar atau ahli. Sehingga baginya tidaklah mungkin seorang mengakui dirinya pakar berdasarkan pada pengakuan diri sendiri. Namun, dalam kasus ini perlunya pengakuan yang berlandaskan komunitas ahli pada bidangnya.

Sementara itu munculnya penolakan atas pakar di era Modern memang tak dapat disangkal, meski di Barat mereka secara sadar tetap mengakuinya. Bacon menanggapi peran pakar tetap dibutuhkan, karena masyarakat saat itu acap kali masih terbelenggu oleh dogma, takhayul, serta keyakinan tak berdasar. (Bacon et al., 2000, p. 79; Jamie Carlin Watson, 2022, p. 74) Khun pun serupa, kepentingan atas pakar masih diperlukan sebagai rujukan atas *problem-solving* terjadi. (Khun mengungkapkan, “a relatively large part of the concrete problem-solving ability that has accrued to science through its predecessors.” Kuhn, 2012, p. 159) Walaupun, Watson menerangkan pada masa itu seorang agamawan dan filsuf utamanya berbicara terkait etika dan metafisika tak dapat dinamakan pakar. Mereka menyebut saintis, insiyur, dan dokter saja yang boleh disebut pakar (ahli). (Jamie Carlin Watson, 2022, p. 76) Namun, ide ini tidak seutuhnya benar, sehingga ide tersebut tentu perlu diuji kembali.

Beda halnya dalam tradisi Islam. Pencarian padanan atas kata tersebut bukan hal mudah. Meski, disinyalir terdapat istilah sepadu, yakni ulama. Namun, tidak dapat dibenarkan jika pakar adalah ulama, tetapi ulama tentu pakar. (Syamsuddin Arif, 2017, p. 18) Bahkan, pencarian atas maknanya pun sebetulnya sukar ditelusuri. (Syamsuddin Arif, 2017, p. 18) Kata ulama berasal dari bentuk *jama'*, '*ālim* berarti 'yang tahu' dan 'yang mempunyai pengetahuan'. Disebutkan dalam *Mu'jam al-Wasīṭ*, ulama ialah orang berilmu pengetahuan. (Majma' al-Lughah al-'Arabiyah bi-l-Qāhirah et al., 1431, p. 624) *Lisān al-'Arab* menambahkan terdapat terma lain, yaitu '*ullām* searti dengan ulama. Bahkan, Ibn Manzūr menjelaskan kiranya seorang '*ālim* tersebut merupakan '*ālim* sejati dinamakan '*allām* atau '*allāmah*. (Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzūr al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Afriqi, 1414, p. 417) Allah pada Dzat-Nya pun memiliki sifat demikian dinisbahkan sebagai *al-'ālim*. (QS. al-Zumar: 46. QS. al-Hijr: 86. QS. al-Ma'idah: 109. Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzūr al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Afriqi, 1414, p. 416) Di mana sumber pengetahuan dalam Islam utamanya merujuk kepada-Nya melalui perantara wahyu.

Umumnya, makna ulama merujuk pada penguasaannya terhadap ilmu agama Islam. (Zaman, 2010, p. 3) Ibnu Manzūr mengartikannya sebagai *aldzi ya'malu bimā ya'lamu*. Selain itu beliau juga mengutip pandangan dari ulama lain seperti Sibawayh bahwa yang dimengerti sebagai ulama, yaitu *al-ulamā'u man lā yaqūlu illā 'āliman*. Bahkan, yang dimaksud disini tentu bijak atas ilmunya sebagaimana dalam QS. Ali Imran: 7. Mereka memiliki kekhasan dalam dirinya dimana mendasari segala perbuatannya atas ketundukan dan ketakutan (*khasyah*) kepada Allah. (Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzūr al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-

Afriqi, 1414, p. 417) Tidak tepat jika makna ulama hanya dimengerti sebatas dasar pengetahuan semata.

Adanya penguasaan yang mendalam mengantarkannya kepada bentuk pengakuan. Kesaksian ini merupakan faktor penting bagaimana seorang bisa benar mendakwainya sebagai ulama. Seperti dikatakan oleh Imam as-Syātibi dalam kitab *al-ʿItisām*, “seorang alim tidak diakui kelimuwannya maka derajatnya masih sama sebelumnya, yakni dianggap belum berilmu hingga ada yang mengakuinya berdasarkan atas kesaksiannya terhadap yang mereka ketahui.” (Abū Ishāq as-Shātibī, 1412, p. 738) Sehingga, tak mungkin seorang dapat mengakui dirinya alim berdasarkan atas pengakuan dirinya sendiri. Justru, kesaksian akan muncul akibat penilaian orang atas kapasitas dirinya.

Al-Attas juga telah memberikan gambaran atas ulama. Menurutnya, ulama adalah sosok yang memiliki kearifan spiritual yang memberikan sumbangan besar kepada ilmu dan pandangan alam (*worldview*) Islam, baik dalam bentuk kecerdasan, budi dan ilmu spiritual. Selebihnya, dalam bentuk banyaknya analisa, tafsiran, ulasan sendiri asli serta tertulis. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2011, p. 137) Hal ini menandai bahwa dalam Islam kedudukan seorang berilmu tak lahir berdasarkan kedalamannya terhadap bidang dia kuasai. Namun, pasti berlandaskan pada budi pekerti serta akhlak yang terpuji.

Di sisi lain munculnya pengkaburan makna atas ulama kerap terjadi. Pemahaman ini disebabkan ragam paham sekular hadir telah meresap dalam pikiran umat Islam. (Ahmad, 2000, p. 23; Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2015, pp. 4-5) Seperti yang diutarakan W. Montgomery yang mengatakan bahwa kemunculan gerakan Islam didorong oleh golongan ulama yang menginginkan kekuasaan yang lebih atas kedudukan sosial. (Watt, 1988) Berbeda atas pandangan Kuru. Menurutnya, tak dinafikan memang terdapat ulama yang cenderung serta becengkrama dengan penguasa yang ada. Tetapi, fakta bahwasannya masih adanya ulama independen dan menolak untuk menghindari penguasa juga dapat ditemukan. (Kuru, 2019, p. 3) Pertembungan ini juga dijelaskan pula oleh al-Kilani pun sama seperti potret demikian. (Majid Irsan al-Kilani, 2002, pp. 197-198) Pemaknaan yang demikian inilah akhirnya memperkeruh makna ulama beserta peranannya.

Dampak adanya unsur sekular pada definisi ulama amatlah jelas. Polemik ini dibuktikan atas maraknya pemaknaan akan ulama yang terbatas sebagai ahli dalam bidang agama semata. Makna ulama akhirnya terdiskreditkan akibat kegagalan individu mengenalinya. Padahal, sebetulnya ulama mengikuti penjelasan sarjana lain seperti dinukilkan al-Qannūji ialah sosok ahli yang mampu menghimpunkan antara ilmu *maʿqul* (perolehan) dengan ilmu *manqul* (wahyu). (Ahmad, 2000, p. 17) Pengertian ini juga ditegaskan oleh Sayyid Qutb, mereka para ulama merupakan golongan yang dapat menghubungkan ilmu kealaman demi memahami kebesaran Allah. (Sayyid Qutb, 1972, p. 2943) Sama halnya dengan al-Attas berpendapat “the men of discernment in knowledge of religion and the sciences related to it (i.e. the genuine ‘*ulamā*’).” (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2015, p. 4)

Diteruskan pula oleh Alparslan Açıkgenç;

What we mean by the term ‘*ulamā*’ is primarily ‘scholars of Islam’, which includes all scholars, such as philosophers, theologians, physicists, chemists,

and astronomers, who carry out their scientific activities within the Islamic worldview. Therefore, we do not mean merely its contemporary usage, which includes only the traditional Islamic scholars as a class of *clergy* which is indeed a corrupt usage. (Alparslan Açikgenç, 1996, p. 4)

Tampak terlihat bahwa Alparslan mendukung bahwa ulama tidak cukup hanya dipahami sebagai sosok ahli dalam bidang agama. Kesalahan definitif inilah baginya kerap menimbulkan malfungsi terhadap penilaian peranan ulama.

Ragam istilah pun acap kali disandingkan dengan kata ulama. Pertama, *ulū al-‘ilm* yakni orang-orang yang memiliki ilmu. Kedua, *ahludz dzikr*, bermakna orang berpengetahuan mengenai kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Ketiga, *ulū al-albāb*. Tiga istilah ini pada umumnya kerap digunakan dalam menunjukkan kapasitas keilmuan dalam tradisi Islam. (Syamsuddin Arif, 2017, p. 13) Al-Attas pun tercatat ketika dirinya menerangkan kedudukan *ahl* atas QS. al-Nisa: 58 yang tertuju pada seorang ahli atau pakar yang mana disebutkan pula dalam al-Qur’an seperti *ulū al-‘ilm*, *ulū al-abṣār*, dan *ulū al-albāb*. Dimana awal fase Islam itu dinamakan sebagai ulama merupakan bentuk otoritas dalam tradisi Islam. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2015, p. 5)

Di samping itu, munculnya anggapan bahwa pakar berbeda dengan otoritas tak dinafikan. Serupa yang dilakukan Nichols seolah-olah telah menggeser arti pakar ke bingkai otoritas. Dirinya menyebutkan seorang ahli yang diakui tentu memiliki otoritas dalam memberikan gagasannya. Adapun, pergeseran definitif ini disinyalir lantaran lenturnya penggunaan cakupan dari bahasa yang kerap digunakan demi menjelaskan pakar. Seperti ungkapan Lynne Tirrell, “*the doctor’s knowledge is a power.*” Tuturnya, pengetahuan dimiliki pakar lebih dimaknai sebagai aturan, berbanding balik kebutuhan atas pakar itu sendiri. (PERITIA, 2022) Watson mengungkapkan bahwa istilah *expert* dapat memberikan gambaran tertentu atas jenis otoritas tetapi tidak semua dari otoritas mampu menggambarkan kepakaran. (Jamie Carlin Watson, 2022, p. 130; Zagzebski, 2012, p. 5) Letak inilah kerap kali disalah artikan umumnya, maka jelas bahwa tidak semua otoritas dapat disebut sebagai pakar. Walaupun ke depannya kita tidak menitik beratkan pada distingsih keduanya. Melainkan, lebih menekankan kepada aspek substantif justru secara umumnya memiliki kesamaan dasar.

Islam memiliki pandangan berbeda mengenai otoritas. Di mana perbedaan antara pakar dan otoritas tak terjadi. (Ugi Suharto, 2020) Al-Attas menjelaskan urgensi otoritas diperlukan sebagai upaya mendapatkan ilmu yang benar. Unikinya, sosok yang dianggap otoritas sah akan selalu mengakui adanya hierarki lebih tinggi selain dirinya. Di mana puncak otoritas dalam Islam tercermin pada diri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, kewajiban orang Islam selaku umatnya bersikap penuh rasa penghormatan, cinta, kerendahan hati dan kepercayaan yang cerdas atas ketepatan ilmu yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh otoritas tersebut. Letak sikap ini mustahil terjadi jika tidak dilandasi hierarki pada tingkatan manusia dan otoritas di dalamnya mempersyaratkan *kecerdasan*, *ilmu spiritual*, dan *budi pekerti*. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2011, p. 131) Islam pun tidak membenarkan adanya hierarki tidak jelas lantaran itu bukan bagian ketertiban (*order*) melainkan kekacauan

(*disorder*). Kekacauan ini dipicu atas ketidakadilan terjadi merujuk ide al-Attas. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2011, p. 131)

Sementara itu, dalam tradisi Islam pengetahuan mengenai Islam dan pandangan alam (*worldview*) Islam berdasarkan atas otoritas. Karena Islam merupakan ajaran dan agama yang telah sempurna sejak awalnya, maka tidak memerlukan perubahan dan perkembangan ke arah yang sempurna. Disinilah menurut al-Attas bahwa setiap orang Islam dimungkinkan untuk memiliki potensi memahami Islam. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2011, p. 131) Di mana Islam pada dasarnya justru mendudukan otoritas yang kerap disalah maknai. Maka, otoritas dalam pengertian Islam amat berbeda dengan pemaknaan kekuasaan, seperti dimaknai oleh Barat berkonotasi negatif. Justru, otoritas dalam Islam berangkat dari pijakan kesadaran yang utuh.

### **Pakar, Kebenaran dan Pengetahuan**

Dalam menilai kedudukan pakar tidak mungkin dilepas posisinya sebagai subjek. Manusia layaknya subjek individu merupakan suatu entitas berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Baik Barat maupun Muslim memiliki polemik sama mendasar atas kajian mereka terhadap manusia. Terutama dalam ruang lingkup kemampuan manusia terdistorsi pada hewan semata. Anggapan mereka atas manusia layaknya hewan berkemampuan khusus terspesialisasikan. (Robert Heinlen berkata, "Specialization is for insects". Heinlein, 1984, p. 266; Jacques Maritain, 1964, pp. 18–19; Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, p. 60) Imbasnya kepada pengertian potensial pada diri manusia pun tersempitkan. Sebetulnya baik Islam maupun Barat sadar betul akan hal ini. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2015, p. vi, 2015, pp. 12–14) Manusia merupakan entitas ciptaan spesial secara kapasitas berbeda.

Kebolehan manusia untuk mengenal suatu pasti merupakan kemampuan yang tertanam dalam dirinya. (Mohd Zaidi Ismail, 2018, p. 6; Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2001, p. 50; Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, p. 57) Meski, model pembicaraan ini kerap diciderai kebohongan serta dianggap usang. (Fransisco Budi Hardiman, 2021, p. 126; Lynch, 2004, p. 2) Tetapi, kebutuhan atas pencarian sebenarnya masih diperlukan. Seperti yang dilakukan Aristotle ketika dirinya ingin berseberangan dari gagasan gurunya Plato. Dia berkata, kita menghormati Plato, tetapi kita lebih menghormati kebenaran. (*Plato is dear to us, but truth is dearer*). (Aristotle & Martin Ostwald, 1962, pp. 9–10) Kebutuhan ini, sebetulnya rentetan dari kegagalan individu ketika dihadapkan oleh masalah. Sehingga mereka pun membutuhkan sosok yang dianggap ahli sebagai solusi dalam mengentaskan masalah yang terjadi. (Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, p. 21) Sifat alamiah inilah sememangnya dapat ditemukan hampir pada tiap individu. Maka, tidak salah jika munculnya anggapan bahwa individu akan semakin yakin atas suatu tindakan bilamana telah didasari pendapat yang diberikan ahli. (Kuru, 2019, p. 59; Moosa, 2003, p. 122)

Kebenaran atas pengetahuan merupakan hal penting. Namun, mencuatnya anggapan kebenaran seperti apa yang ahli tuju kerap kali menimbulkan polemik tersendiri. (Martin Hollis, 2013, pp. 289–299) Di Barat, penjelasan mengenai kebenaran terus bergulir. Derasnya arus perubahan menyebabkan ketakpastian dalam memetakan kebenaran terjadi. Al-Attas menerangkan bahwa dialog terkait

kebenaran oleh Barat hanya terbatas pada medan perspektif. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1995, p. 135) Bahkan, jika ditilik lebih lanjut perbincangan akan kebenaran cenderung berkecenderungan di ranah epistemik. Kecenderungan mengutamakan satu aspek dan penafian atas aspek lain tergambar jelas dalam tradisi mereka. (Mohd Zaidi Ismail, 2018, p. 9; Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, pp. 44-45) Munculnya model dualisme pemisahan antara realitas dan kebenaran melekat pada unsurnya. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1995, pp. 85-86) Lebih dari itu, kebenaran menurutnya berdasar kepada apa yang mereka butuhkan. (Capps, 2019) Imbasnya, nilai kebenaran pun terdistorsi dengan sejauh mana individu memerlukannya. Bahkan, kebenaran diusung oleh individu sering berseberangan dengan 'pikiran kolektif'. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1995, p. 117) Nilai kebenaran selaras dengan kesepakatan masyarakat.

Selain itu, hadirnya sosok ahli berbicara luar bidang ia kuasai telah bergulir di masyarakat. Citra ini sering disebut *epistemic trespassing*. Di mana seorang ahli pada bidang tertentu berbicara atas materi di luar domain ia kuasai. Nathan menjelaskan karakter yang melekat 'trespassers'. Pertama, karakter 'trespassers' cenderung disifati negatif. Adanya ketak-sederhanaan, dogmatik, arogansi terpampang jelas dalam citra mereka. Kedua, kelemahan trespasser tampak pada kepercayaan dirinya atas idenya dan pertanyaan hadir berkisar pada bidang lainnya. (Nathan Ballantyne, 2019, pp. 3-4) Bagi masyarakat awam Barat kejadian tersebut bukanlah bagian krusial. Namun, merujuk Nathan ini hanya menjadi masalah bagi sesama ahli. Macam respon terealisasi demikian, baik pro maupun kontra. Akan tetapi, kejadian demikian akan menjadi masalah jika ahli tidak sadar atas keterbatasan yang ia miliki. Akibatnya, justru malah menciderai kebenaran atas pengetahuan.

Islam merupakan agama berdasar ilmu. (Ugi Suharto, 2020) Ilmu dalam Islam mengandung nilai kebenaran yang pasti. Bahkan, pencarian terhadapnya telah mengartikan suatu pengembalian terhadap pengenalan atas kebenaran mutlak. (Al-Attas menyebutkan pengetahuan yang benar dalam Islam mengindikasikan adanya pengenalan atas batasan kebenaran masing-masing objek. Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1995, p. 111, 1995, pp. 134-135) Serta, sumber dari sebarang ilmu *al-'ālim* yakni, Allah. (QS. al-Zumar: 46, al-Hijr: 86 dan al-Ma'idah: 109. Rosenthal, 2007, p. 29) Kemudian, ditransmisikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu. Rangkain ini telah membangun jejaring bahwa Islam merupakan agama berdasar ilmu. Jadi, Islam tak membenarkan masing-masing individunya untuk berbuat jahil. (Abdurrahman Hasan Habanakkah al-Maidani, 1993, p. 11) Sebab itu, Islam menuntut perlunya ilmu serta pencarian terhadapnya.

Syamsuddin Arif pun menyatakan demikian:

Ilmu dan kebenaran itu setali tiga uang karena ilmu adalah mengetahui yang benar, dan yang benar adalah ilmu. Memiliki ilmu artinya menggenggam kebenaran. Menolak kebenaran sama dengan menolak ilmu. Walhasil, mengetahui itu tidak lain adalah mengetahui yang benar. Maka, mengetahui yang salah itu bukan ilmu karena itu bukan kebenaran. Dan kebenaran yang salah itu tidak ada dan mustahil ada (kecuali bagi orang gila barangkali). (Syamsuddin Arif, 2016, pp. 1-2)

Maklumat yang salah meski bermakna besar bagi pemiliknya bukanlah ilmu. Tetapi, hanya perasaan (dugaan), *shakk*, atau *zann* semata yang menjerumus pada gejala lain yakni anti-ilmu dan mudah hancur ditentang oleh sebenar ilmu. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2019, p. 6; Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, p. 51) Makna yang tidak berlandaskan kebenaran tidak boleh mengukuhkan pribadi. Maklumat meski benar walau tak bermakna tidak dapat disebut ilmu. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1990, p. 51)

Ragam ulasan interpretasi lahir dengan masifnya. Maraknya gagasan mencuat ke permukaan timbul akibat hadirnya golongan ahli. Akhirnya, disempitkan melalui tuduhan bagaimana mungkin sumber Islam dinilai benar akan validitasnya jika telah didistorsi macam pandangan. (Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, p. 57) Sebetulnya, Islam telah memberikan batasan nyata atas masalah ini. Tercermin dalam utasan sifat patut tertanam pada ulama. Menstir ungkapan Ibn Taymiyyah, “*Wa man lahu fi l-ummah lisānu šidqin ‘āmm bi-haytsu yutsnā ‘alayhi wa yuḥmadu fi jamāhīri ajnāsi l-ummah, fa-hā’ulai’i a’immatu l-huda wa maṣābiḥu ad-dujā*”. (Ibn Taymiyyah, 1416, p. 43) Terang bahwa seorang ulama tersifati baginya kepercayaan dimana seorang ulama merupakan orang sholeh pastinya dapat dipercaya.

Pernyataan di atas bukanlah anggapan apologetik belaka bahwa pakar selalu benar. Tetapi, menegaskan bahwa sosok yang disebut ahli sepatutnya telah terbenak bagi dirinya apa yang dimengerti sebagai ‘benar’. Karena ia sebagai pemangku amanah ilmu dibatasi oleh rasa kebertanggungjawaban takut tunduk kepada sumber ilmu yang mutlak kebenarannya. Titik inilah bagian limitasi dimiliki pakar. Jika dia mengatakan sesuatu di luar nilai kebenaran maka sebetulnya dia telah mencoret kebenaran ilmu terpatrit di dalamnya. Kegagalan ini menyebabkan adanya kekeliruan dalam memakna pengetahuan. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2015, p. 5) Akhirnya, hilanglah idealisme patutnya mereka bangun. Akibatnya, munculnya kerancuan daripada kejelasan hadir di masyarakat.

### **Antisipasi Terhadap Chaotic Society**

Perbincangan kini dimengerti sebagai *chaotic society* bukanlah kajian *futurologis*. Peristiwa ini tak bersumber hasil dari prediksi belaka. Melainkan, bermula dari dorongan kesadaran acap kali luput perhatiannya oleh masyarakat kini. (Fransisco Budi Hardiman, 2003, pp. 73-74) Anggapan kewajaran muncul sehingga tumpuhnya sensitifitas mengakibatkan kegagalan melihat realitas patologis kini. (Fransisco Budi Hardiman, 2003, pp. 13-14) Umumnya pembicaraan ini berkuat pada ketakserasian dan ketakberaturan terjadi dalam lingkungan sosial. (Bishop, 2017; Hauser, 1969, p. 1; Leonard A. Smith, 2007, p. 16) Timbulnya gejala mengacu padanya pun kian makin terlihat. Sehingga, pembahasan dimengerti sebagai *chaotic society* patut dipertontonkan kembali. Sebagai upaya manusia agar tidak terjerembap ke dalamnya.

Cerminan atas *the chaotic society* termanifestasikan melalui kehidupan masyarakat kontemporer. Mengikuti Hauser, hadirnya elemen dasar seperti kebingungan serta tak beraturan telah terasimilasi di dalamnya. Selain itu, terdapat istilah lain sepadan menurut dia, yakni *the anachronistic society*. (Hauser, 1969, p. 1) Fenomena ini berawal dari banyaknya faktor bermunculan. Baginya masalah ini

dipicu oleh adanya ledakan demografi disusul banyaknya jumlah lapisan kultur di masyarakat. Cukup berbeda dengan tatanan masyarakat sebelumnya. Bahkan, masyarakat kontemporer pun sejatinya telah memiliki konstruk pengetahuannya sendiri. Di mana wujudnya pengetahuan ini disinyalir oleh Hauser mampu untuk mengatasi polemik ini.

Berbagai persepsi atas chaos hadir demikian rupa. Kutub negatif dan positif telah menghiasi perbincangannya. Anggapan chaos sebagai hal positif mengarah pada perubahan asalkan dibatasi oleh norma tertentu (*management chaos*) digalakan. (Yasraf Amir Piliang, 2020, p. 373) Pun sebaliknya dengan pandangan berlawanan. Di mana penjelasan tersebut semakin berbahaya untuk dimungkinkan terjerumus kepada *total disorder*. Kemudian, gilirannya justru melahirkan kematian akan budaya (*cultural catastrophe*). (Meiner & Veel, 2012, p. 1) Tentu, sisi negatif ini amat berbahaya dan perlu menjadi penekanan tersendiri.

Virus bebalisme dan kesilapan ilmu merupakan satu dari sekian faktor. Penyakit bebalisme ini tanpa sadari bagi Syed Husein Alatas sudah menjangkit diri masyarakat. (Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, p. 61) Penolakan atas posisi dan kegagalan sosok dianggap 'ahli' serta munculnya anggapan bahwa semua pendapat benar memicu polemik ini. Lahirnya pemimpin tak memiliki kapasitas memadai sebagai otoritas pun bermunculan. Akhirnya, berdampak pada tujuan ilmu sejatinya. Seperti dicatatkan oleh al-Attas:

Knowledge whose nature has become problematic because it has lost its true purpose due to being unjustly conceived and has thus brought about chaos in man's life instead of, and rather than, peace and justice. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1995, p. 84)

Lahirnya masalah disebabkan ilmu telah memicu chaos terhadap individu manusia. Imbasnya pada titik tertentu memicu apa yang dinamakan krisis identitas manusia. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1995, pp. 82–84, 2001, p. 44) Kini manusia telah berubah bagai objek rekaannya sendiri. (Fransisco Budi Hardiman, 2003, p. 102) Manusia menjadi parodi bagi dirinya sendiri. (Bataille & Stoekl, 1985, p. 5; Yasraf Amir Piliang, 2020, p. 385) Gagalnya individu mengenal identitasnya menjerumuskan individu ke dalam pembajakan identitas.

*Ill-informed* menyeruak akibat adanya kompetisi antara ahli dan non-ahli. (A. Goldman & O'Connor, 2021) Realitas ini bermula dari individu mendakwakan dirinya seorang pakar, tetapi tidak mampu untuk memberikan jawaban, solusi serta tanggung jawab terhadap apa yang mereka nyatakan. (Grundmann, 2017, p. 3) Disusul dengan ledakan informasi menambah runyam masalah. (Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019) Akibatnya, kini manusia sedang memasuki masa pembodohan. (Peters et al., 1958, p. 221) Disebabkan adanya *fake knowledge* yang telah menjamur menghiasi realitas saat ini, serta dampaknya amat fatal bagi kehidupan manusia. (Henning Hopf et al., 2019, p. 3) Atau diartikan al-Attas sebagai bentuk *corruption of knowledge*. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1995, p. 15) Hal inilah sebenarnya patut dihindari oleh masing individu. Kerancuan terstruktur secara hirarki akibat penyamaratan telah menghancurkan beberapa segi dalam kehidupan. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2011, pp. 131–132) Al-Attas memperingatkan akan kemunculan hal ini. Di mana kini kerap kali banyak ilmuwan palsu yang justru bukan menjaga kebenaran ilmu namun

merusak ilmu dan cenderung membatasinya. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2011, p. 145) Sehingga, munculnya kerusakan demikian merupakan sebab-sebab dari kegagalan mereka dalam mengenali kemampuan dirinya.

Al-Attas menerangkan pula terkait tingkatan individu dalam masyarakat. Baginya bahwa tujuan ini sama sekali tidak bermaksud menciptakan hirarki penindasan dan eksploitasi serta penguasaan yang diakui benar seolah-olah sebuah prinsip yang telah tegak dan diperintahkan oleh Allah. Sesuatu 'hirarki' dan 'aturan' yang tidak jelas tidak seharusnya dibenarkan, karena tingkatan tersebut sama sekali bukan ketertiban (*order*) melainkan kekacauan (*disorder*) dan adab bukan penyerahan kepada kekacauan karena ia bertentangan dengan keadilan. Kekacauan adalah manifestasi terjadinya ketidakadilan. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2011, p. 131) Sehingga dalam pandangannya jelas bahwa anggapan yang menyamakan semua pendapat sama tidak dibenarkan.

Ibn Taimiyyah pun menegaskan bahwa kegagalan akibat pemahaman yang tidak utuh justru akan merusak berbagai macam bidang dalam kehidupan. Bahkan, dapat merusak manusia sekalipun. (Ibn Taymiyyah, n.d., p. 411) Jelas Ibn Taimiyyah juga telah memberikan peringatan bahwa pemahaman yang setengah-setengah atas suatu bidang justru akan menghancurkan bidang tersebut bahkan terhadap diri manusia sekalipun. Kekeliruan yang berlanjut tanpa munculnya solusi inilah yang digambarkan oleh al-Attas layaknya siklus lingkaran. (Wan Daud, 2016, p. 65) Di mana dalam lingkaran tersebut al-Attas memberikan solusinya dengan memperhatikan aspek adab sebagai solusi kerancuan saat ini. Bersumber dari kegagalan individu dalam meletakkan sesuatu pada tempat sejatinya. Akhirnya, berimplikasi pada timbulnya ragam kekacauan.

### **Signifikansi Peran Pakar**

Menjadi seorang pakar bukanlah perkara yang mudah. (Ericsson, 2018, p. 114; A. I. Goldman, 2001, p. 91) Ditinjau dari kebutuhannya bahwa menjadi seorang ahli perlu adanya kriteria yang memadai. Aspek demikian ini tanpa disadari sering kali dilupakan oleh masyarakat umumnya. Sehingga hilangnya gambaran utuh atas intelektual telah mengantarkan kepada kebingungan pada masyarakat. (Arif, 2018, p. 47) Timbulnya beragam luapan informasi telah tersebar di masyarakat. (Greenfeld, 2014) Penilaian atas validitasnya pun akhirnya kembali dipertaruhkan. Disinilah kemudian, menurut Goldman bahwa pentingnya merujuk kepada pakar yang sejatinya menjadi perlu sebagai jawaban yang benar. (A. I. Goldman, 2001, p. 92) Pakar yang benar inilah yang akan menjadi solusi atas kesilapan yang terjadi.

Pentingnya kedudukan atas pakar terlihat jelas dari beragam peran dalam masyarakat. Adanya ragam penamaan atas perannya ini menjadi bentuk penegas masyarakat sebetulnya tanpa disadari membutuhkan sosok ahli. Wujud perbedaan penyebutan ini bukanlah menandakan bahwa terdapat perbedaan antara pakar bidang satu dengan yang lainnya. Namun, dalam tulisan ini yang perlu dipertegas bahwa keberadaan penamaan atas pakar ini menandakan adanya kriteria yang ketat yang diberikan oleh masing-masing bidang maupun disiplin ilmu terkait. (Levi, 1960, p. 356; Isaac Levi mengamati bahwa "that scientists commit themselves to certain standards of inference when they become a member of the profession". Reiss &

Sprenger, 2020) Maka, tidak jarang banyak yang menyebutkan kedudukan pakar sebagai konsultan.(Grundmann, 2017, p. 3) Pakar sebagai pemangku kebijakan. – *epistocratic*. Keterlibatan pakar dengan otoritas.(Fridland & Pavese, 2021, p. 445) Bauman pun menyebutkan sosok ahli baik zaman modern dan post-modern dengan ‘legislators’ dan ‘interpreters’.(Bauman, 1987, pp. 4–5) Keberagaman penyebutan penamaan inilah menjadi bagian nyata hadirnya pakar dalam masyarakat.

Meski, tak dapat dipungkiri munculnya keyakinan dibarengi rasa khawatir terhadap ahli keluar dari idealismenya kerap terjadi.(Nichols, 2017, p. 177) Disusul dengan adanya marginalitas terhadap peranannya utamanya memasuki fase Abad ke 19 – 20 menempatkan posisi ahli cenderung dilematis.(Said, 1994, p. 68) Namun, perlu digaris bawahi bahwa kesalahan tersebut tidak patut untuk digeneralisasikan. Mereka menyatakan bahwa “Experts are not infallible. They have made terrible mistakes, with ghastly consequences.”(Nichols, 2017, p. 10) Akan tetapi mereka sepertinya tidak paham bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pakar tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan kesalahan individu yang tidak mengetahuinya.(Nichols, 2017, p. 36) Jelas, bahwa pakar tetap memiliki kebermanfaatannya yang perlu bagi masyarakat.

Islam pun juga telah menegaskan pentingnya sosok yang dianggap ahli. Allah SWT juga telah memerintahkan manusia untuk memberikan kepercayaan kita (*an tu'addu l-amanat*) kepada mereka yang berhak mendapatkannya (*ila ahliha*) berarti kita seharusnya telah mengetahui yang benar dari yang palsu dan betul dari yang salah dalam memberi kepercayaan tanggungjawab kepemimpinan yang benar. Jika tidak, Allah tidak akan memerintahkan demikian.(Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1993, p. 109) Pun Rasul juga mengingatkan bahwa perlunya untuk menghindari pemimpin jahil, lantaran “mereka adalah golongan sesat dan menyesatkan”.(Al-Baghawī, 1406, p. 169) Disinilah al-Attas memberikan penekanan perlunya pengenalan yang betul pakar atau ahli yang benar. Sebagai tawaran atas pengenalan individu yang memiliki moral integritas serta pengetahuan otentik.(Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2015, p. 5)

Edward W. Said pun mengingatkan rasa tanggung jawab patut diemban oleh sosok ahli. Dia menerangkan tiada patut untuk dicela melainkan sifat terbenak dalam diri seorang intelektual jika dirinya menghindari ragam polemik lantaran takut, berpaling ataupun dalam posisi yang sulit dan prinsipil. Jika sosok ahli hanya ingin menjaga reputasi mereka agar dipandang moderat, objektif serta seimbang.(Said, 1994, p. 100) Sejujurnya bagi Said mereka sudah menciderai tugas utama mereka. Meminjam istilah Said mereka inilah sebetulnya telah melakukan korupsi tertinggi.(Said, 1994, p. 101) Di sisi lain, Nichols menyebutkan tugas utama sosok ahli adalah menjernihkan kerunyaman yang terjadi di masyarakat.(Nichols, 2017, p. 28) Disinilah letak tanggungjawab sewajarnya diemban oleh pakar.

Macam tawaran solutif hadir demikian. Wan Daud pun menjelaskan secara implisit bahwa peranan atas otoritas itu perlu.(*Krisis Otoritas, Ateisme, dan Ekstremisme*, 2016; Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, p. 16) Ini dapat dilihat dari wujudnya budaya ilmu yang sehat baginya. Membangun budaya ilmu perlu digalakan, hematnya bagi Wan Daud dengan adanya konstruk budaya ilmu yang betul dapat mewujudkan citra pada setiap lapisan masyarakat mampu terlibat dalam kesempatan keilmuan.(Wan Mohd Nor Wan Daud, 2019, p. 43) Konsekuensinya,

tipisnya disparitas antara ahli dan awam sudah tak terjadi lagi melewati model demikian. Pun tampaknya senada dengan Tom Nichols perlunya mendorong masyarakat untuk mengerti dan mampu untuk menilai pakar dengan mendidik diri bukan hanya mengambil aspek yang mereka inginkan, tetapi lebih pada sosok yang mereka dengar. (Nichols, 2017, p. 206) Sehingga, penempatan tepat atas pakar sesuai atas kapasitasnya terjadi.

### Kesimpulan

Mencuatnya permasalahan menyudutkan posisi pakar menimbulkan ragam tanggapan. Pentingnya sosok ahli kini kian didiskreditkan. Akibatnya, kesilapan pun terjadi dimana-mana utamanya dalam masyarakat. Berpangkal dari hilangnya pengetahuan benar sebagai asas entitas kebenaran. Konsekuensinya, lahir kerancuan di tingkatan sosial pun tak mampu dielakan. Kegagalan dalam mengidentifikasi kebenaran dan kepalsuan akhirnya terjadi di masyarakat. Kebingungan dan kekacauan akhirnya terealisasi. Disinilah tanggung jawab pakar dalam menjernihkan masalah yang ada. Namun, ini perlu dibersamai dengan pengenalan sosok ahli yang betul. Maka, munculnya tawaran seperti budaya ilmu serta berlaku adil dalam melihat ahli perlu. Sehingga, pemetaan pakar sesuai kedudukannya berlandaskan kapasitasnya diharapkan mendorong perannya secara optimal.

### REFERENSI

- Abdurrahman Hasan Habanakkah al-Maidani. (1993). *Ḍawābiṭ al-Ma'rifah wa Uṣūl al-Istidlāl wa al-Munāzarah*. Dār al-Qalam.
- Abū Ishāq as-Shāṭibī. (1412). *Al-'Itiṣām* (Salīm bin 'Ied al-Hilālī, Ed.). Dār Ibn 'Affān.
- Ahmad, S. (2000). Aplikasi Konsep 'Ulama dan Intelektual: Satu Penilaian Kritis. *Jurnal Usuluddin*, 11, 13–32.
- Al-Baghawī. (1406). *Maṣābih al-Sunnah* (Vol. 4). Dār al-Ma'rifah.
- Alister E. Mcgrath. (2007). *Christianity's Dangerous Idea: The Protestant Revolution—A History from the Sixteenth Century to the Twenty-First*. Harper Collins.
- Alparslan Açıkgenç. (1996). *Islamic Science: Towards A Definition*. ISTAC.
- Anthony Preus. (2015). *Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy*. Rowman & Littlefield.
- Arif, S. (2018). *Islam dan Diabolisme Intelektual* (Edisi Kedua). Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS).
- Aristotle. (1987). On the Parts of Animals. In William Ogle (Trans.), *Book I*. Garland Publishing, Incorporated. <https://books.google.co.id/books?id=fTq5xQEACAAJ>
- Aristotle & Martin Ostwald. (1962). *Nicomachean Ethics*. Bobbs-Merrill Educational Publishing.
- Bacon, F., Jardine, L., & Silverthorne, M. (2000). *The New Organon*. Cambridge University Press.
- Bataille, G., & Stoekl, A. (1985). *Visions of Excess: Selected Writings, 1927-1939*. University of Minnesota Press.

- Bauman, Z. (1987). *Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity, and Intellectuals*. Polity Press ; In association with B. Blackwell.
- Beckwith, C. I. (2012). *Warriors of the Cloisters: The Central Asian Origins of Science in the Medieval World*. Princeton University Press.
- Bishop, R. (2017). Chaos. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2017). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/chaos/>
- Capps, J. (2019). The Pragmatic Theory of Truth. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2019). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/ruth-pragmatic/>
- Collins, H. (2018). Studies of Expertise and Experience. *Topoi*, 37(1), 67–77. <https://doi.org/10.1007/s11245-016-9412-1>
- Collins, H. M., & Evans, R. (2007). *Rethinking Expertise*. University of Chicago Press.
- Ericsson, K. A. (Ed.). (2018). *The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance* (Second edition). Cambridge University Press.
- Floridi, L. (1993). The Problem of the Justification of a Theory of Knowledge: Part I: Some Historical Metamorphoses. *Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift Für Allgemeine Wissenschaftstheorie*, 24(2), 205–233.
- Fransisco Budi Hardiman. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Kanisius.
- Fransisco Budi Hardiman. (2021). *Aku Klik Maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital*. Kanisius.
- Fridland, E., & Pavese, C. (Eds.). (2021). *The Routledge Handbook of Philosophy of Skill and Expertise*. Routledge.
- Goldman, A. I. (2001). Experts: Which Ones Should You Trust? *Philosophy and Phenomenological Research*, 63(1), 30.
- Goldman, A., & O'Connor, C. (2021). Social Epistemology. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2021). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/epistemology-social/>
- Greenfeld, K. T. (2014, May 24). Opinion | Faking Cultural Literacy. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2014/05/25/opinion/sunday/faking-cultural-literacy.html>
- Grundmann, R. (2017). The Problem of Expertise in Knowledge Societies. *Minerva*, 55(1), 25–48. <https://doi.org/10.1007/s11024-016-9308-7>
- Hauser, P. M. (1969). The Chaotic Society: Product of the Social Morphological Revolution. *American Sociological Review*, 34(1), 1–19.
- Heinlein, R. A. (1984). *Time Enough for Love*. Hayakawa.
- Henning Hopf, Alain Krief, Goverdhan Mehta, & Stephen A. Matlin. (2019). Fake science and the knowledge crisis: Ignorance can be fatal. *The Royal Society Publishing*. <http://dx.doi.org/10.1098/rsos.190161>
- Ibn Taymiyyah. (n.d.). *Al-Istighathah Fil-Rad 'Ala Al-Bakri*.
- Ibn Taymiyyah. (1416). *Majmu' Fatāwā Syaykh al-Islām* (Vol. 11). Majmu' Mulk Fahd.
- Immanuel Kant. (1784, September 30). *What is Enlightenment?* (Mary C. Smith., Trans.). <http://www.columbia.edu/acis/ets/CCREAD/etscc/kant.html>

- Jacques Maritain. (1964). *Education at the Crossroads*. Yale University Press.
- Jamie Carlin Watson. (2022). *A History and Philosophy of Expertise*. Bloomsbury Academic.
- Klein, P. D. (1983). Real Knowledge. *Synthese*, 55(2), 143–164.
- Krisis Otoritas, Ateisme, dan Ekstremisme. (2016, July 21). Republika Online. <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/07/21/oanqch6-krisis-otoritas-ateisme-dan-ekstremisme>
- Kuhn, T. S. (2012). *The Structure of Scientific Revolutions* (Fourth edition). The University of Chicago Press.
- Kuru, A. T. (2019). *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108296892>
- Leonard A. Smith. (2007). *Chaos: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Levi, I. (1960). Must the Scientist Make Value Judgments? *The Journal of Philosophy*, 57(11), 345. <https://doi.org/10.2307/2023504>
- Lynch, M. P. (2004). *True to Life: Why Truth Matters*. MIT Press.
- Majid Irsan al-Kilani. (2002). *Hakadhā Zāhara Jīl Ṣalāḥ al-Dīn wa Hakadhā `Ādat al-Quds*. Dār al-Qalam.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah bi-l-Qāhirah, Ibrāhīm Muṣṭafa, Aḥmad al-Zayyāt, Ḥāmid 'Abdu al-Qādir, & Muḥammad al-Najār. (1431). *Mu'jam al-Wasīṭ*. Dār al-Da'wah.
- Martin Hollis. (2013). What truth? For whom and where? In J. Jennings & T. Kemp-Welch (Eds.), *Intellectuals in Politics: From the Dreyfus Affair to Salman Rushdie* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203441626>
- Meiner, C., & Veil, K. (Eds.). (2012). *The Cultural Life of Catastrophes and Crises*. De Gruyter.
- Mohd Zaidi Ismail. (2018). *Aqal Dalam Islam: Satu Tinjauan Epistemologi* (Cet. Ketiga). Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) Press.
- Moosa, E. (2003). The Debts and Burdens of Critical Islam. In Omid Safi (Ed.), *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism* (p. 17). Oneworld.
- Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzūr al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Afriqi. (1414). *Lisānu al-'Arab*. Dar al-Sadr.
- Nathan Ballantyne. (2019). Epistemic Trespassing. *Mind*, 128(510), 367–395. <https://doi.org/10.1093/mind/fzx042>
- Nichols, T. (2017). *The Death of Expertise: The campaign against established knowledge and why it matters*. Oxford University Press.
- Parry, R. (2020). Episteme and Techne. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2021). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/episteme-techne/>
- PERITIA (Director). (2022, June 16). *Truth, Trust, & Fear of Expertise* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=hvnn2O4sPg4>
- Peters, R. S., Winch, P. G., & Duncan-Jones, A. E. (1958). Symposium: Authority. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes*, 3, 207–260.
- Plato. (1952). *Plato: Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus* (W. R. M. Lamb, Trans.). Harvard University Press.

- Reiss, J., & Sprenger, J. (2020). Scientific Objectivity. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2020). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/scientific-objectivity/>
- Rosenthal, F. (2007). *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Brill.
- Said, E. W. (1994). *Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures*. Pantheon Books.
- Sayyid Qutb. (1972). *Fī Zilāli al-Qur'an*. Dār al-Shurūq.
- Stewart, C. (2020). Expertise and Authority. *Episteme*, 17(4), 420–437. <https://doi.org/10.1017/epe.2018.43>
- Sullivan, A. (2017). Democracies End When They Are Too Democratic. In Sid Holt & The American Society of Magazine Editors (Eds.), *The Best American Magazine Writing 2017* (p. 26). Columbia University Press.
- Syamsuddin Arif. (2016, March 1). *Ilmu, Kebenaran, dan Keraguan: Refleksi Filosofis-Historis*. Orasi ilmiah disampaikan dalam rangka ulang tahun INSISTS ke-13, Gedung Djoeang '45.
- Syamsuddin Arif. (2017). Intelektual dan Ulama vis-a-vis Penguasa. *Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam: Islamia*, XI(1).
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1990). *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (1993). *Islām and Secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. ISTAC.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2001). *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. ISTAC.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2011). *Islam dan Sekularisme* (Khalif Muammar, Trans.). PIMPIN.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2015). *On Justice and The Nature of Man: A Commentary Sūrah Al-Nisā' (4): 58 and Sūrah Al-Mu'minūn (23): 12-14*. IBFIM.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2019). *Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam*. Ta'dib International.
- Tom Angier. (2021). Technē in the Platonic Dialogues. In E. Fridland & C. Pavese (Eds.), *The Routledge Handbook of Philosophy of Skill and Expertise*. Routledge.
- Ugi Suharto. (2020, Agustus). *Islam, Kepakaran & Komunitas Ilmiah* [Online post]. Kuliah Akhir Semester Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara.
- Wan Daud, W. M. (2016). *Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi* (Cet. Ketujuh). Penerbit Universiti Malaya.
- Wan Mohd Nor Wan Daud. (2019). *Budaya Ilmu Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini*. CASIS.
- Watt, W. M. (1988). *Islamic Fundamentalism and Modernity*. Routledge.
- Yasraf Amir Piliang. (2020). *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Cantrik Pustaka.

Zagzebski, L. T. (2012). *Epistemic Authority: A Theory of Trust, Authority, and Autonomy in Belief*. Oxford University Press.

Zaman, M. Q. (2010). The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change. In *The Ulama in Contemporary Islam*. Princeton University Press.  
<https://doi.org/10.1515/9781400837519>